

TAJUK RENCANA

Tuntutan Hukum Laka Laut

INI fenomena baru dalam penegakan hukum di lingkungan kelautan, khususnya dalam peristiwa kecelakaan laut di Pantai Selatan DIY. Hal ini terkait dengan peristiwa tewasnya empat siswa SMPN 7 Mojokerto saat mandi di Pantai Drini Gunungkidul akhir Januari lalu. Atas peristiwa tersebut, salah satu keluarga korban meninggal Malven Yusuf (13) menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus tersebut ke Polres Gunungkidul. Berkenaan itu, Pemda DIY masih menunggu perkembangan gugatan hukum, termasuk yang dijadikan dasar hukum salah satu keluarga korban kecelakaan laut di Pantai Drini (KR 6/2).

Meski demikian, berdasar informasi dari koran ini, pihak yang diadakan antara lain pengelola pantai. Sebagaimana disampaikan Sekda DIY Beny Suharsono, Pemda DIY akan sangat hati-hati menanggapi situasi tersebut, termasuk aduan terhadap pengelola pantai, akan dilihat dulu aduannya seperti apa. Di sisi lain, pihaknya berjanji akan terus memperbaiki dan melengkapi fasilitas keselamatan di area Pantai Drini.

Berdasar pengalaman terkait peristiwa kecelakaan laut yang terjadi di Pantai Selatan DIY, nampaknya baru kali ini keluarga korban menuntut secara hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab, termasuk kepada pengelola pantai. Namun, kita tak perlu menanggapi langkah tuntutan atau gugatan hukum ini secara berlebihan, melainkan proporsional dan profesional sebagaimana aturan yang berlaku.

Umumnya, orang akan melihat peristiwa tewasnya empat siswa SMPN 7 Mojokerto akibat tergulung ombak di Pantai Drini itu sebagai musibah. Lantaran dinilai sebagai musibah, maka tidak ada pihak yang disalahkan karena itu terjadi oleh sebab faktor alam. Seperti halnya gempa bumi yang menewaskan banyak orang, tak ada yang di-

tuntut atas matinya orang. Lantas, apakah peristiwa tewasnya empat siswa SMPN 7 Mojokerto bisa masuk kategori murni musibah? Benarkah tidak ada upaya manusia untuk mencegah atau mengantisipasi datangnya ombak besar di Pantai Drini?

Di sinilah kita berhati-hati menganalisisnya. Sebab, ada beberapa kemungkinan terkait peristiwa tersebut. Antara lain kemungkinan kelalaian atau kealpaan manusia hingga menyebabkan orang lain meninggal. Namun bisa pula sebaliknya, tidak ada kelalaian, melainkan karena korban sendiri yang berkontribusi sehingga berakibat hilangnya nyawa. Karena itu, untuk mengetahui detail peristiwa kecelakaan laut di Pantai Drini, perlu pemaparan kronologi secara detail untuk menentukan ada tidaknya kelalaian manusia.

Mengacu pemberitaan di media ini, petugas atau Tim SAR Pantai Drini sudah mengingatkan siswa untuk tidak mandi di laut, bahkan peringatan tersebut diulang lewat pengeras suara. Artinya, sudah ada antisipasi dari petugas SAR agar tidak terjadi kecelakaan laut. Namun, korban tetap nekat mandi di laut hingga terjadi laka laut. Bahkan, saat itu, guru pendamping juga ikut menyaksikan peristiwa itu namun tidak bisa berbuat apa-apa, selain meminta tolong Tim SAR. Tim SAR pun sudah berusaha keras menyelamatkan, sedang empat orang lainnya tidak tertolong, ditemukan meninggal di dasar laut.

Dari peristiwa itu kita yakin tidak ada unsur kesalahan dari Tim SAR atau petugas pantai karena mereka telah berusaha maksimal menyelamatkan para korban. Sehingga, rasanya tidak adil bila mereka dimintai pertanggungjawaban hukum. Meski begitu kita setuju perlunya perbaikan sistem pengamanan di pantai guna mencegah kecelakaan laut. □ - d

Menanti Aksi Peduli Literasi Prabowo

BANYAK orang tahu, Presiden Prabowo Subianto adalah seorang yang sangat 'literate' atau memiliki kemampuan literasi sangat tinggi. Beliau tidak hanya seorang jenderal yang terpelajar, melainkan juga seorang jenderal yang suka membaca buku. Sehingga tak mengherankan, kala berkunjung ke India beberapa waktu lalu, beliau menyempatkan diri mampir ke sebuah toko buku langganannya di New Delhi. Di toko buku besar langganannya tersebut Presiden Prabowo memborong banyak buku. Dan pastilah buku-buku yang dibelinya tadi untuk menambah koleksi pribadinya. Di kediamannya, perpustakaan pribadinya menyimpan banyak sekali buku.

Sebagai seorang yang sangat 'literate', Prabowo juga memiliki kemampuan menuliskan olah pemikirannya dalam tulisan. Beliau telah menulis beberapa buku. Di antaranya: (1) Komando: Mengabdikan kepada Negara dan Bangsa (1998), (2) Kembalinya Indonesia: Haluan Baru Keluar dari Kemelut Bangsa (2004), (3) Membangun Kembali Indonesia Raya, Haluan Baru Menuju Kemakmuran (2009), (4) Membangun Kembali Indonesia Raya, Strategi Besar Transformasi Bangsa (2013), (5) Indonesia Menang (2018), (6) Kepemimpinan Militer 1 (2021), (7) Kepemimpinan Militer 2 (2022), dan (8) Paradoks Indonesia dan Solusinya (2022).

Tokoh sekaliber Presiden Prabowo sampai menjadi seperti itu — baca: sangat 'literate' — tentu saja karena pengaruh lingkungan keluarganya. Ayahnya adalah begawan ekonomi Indonesia yang sangat terkenal, Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo. Kakeknya, RM Margono Djojohadikusumo, selain dikenal sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), juga tokoh penting bidang-bidang lain.

Ada banyak jenderal dan mantan jenderal di Indonesia, tetapi yang sangat 'literate' hanya sedikit sekali. Prabowo salah satunya. Khusus presiden dan wakilnya, yang dikenal sangat

Sarworo Soeprapto

'literate' adalah Bung Karno, Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, Adam Malik, dan Budiono.

Secercah Harapan

Tampilnya Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia saat ini, memberi harapan besar bagi dunia literasi. Dengan adanya fakta bahwa saat ini Indonesia termasuk negara yang sangat tertinggal literasinya, wajar kalau harapan untuk kepentingan tersebut layak ditimpakan di pundak presiden. Tentu saja melalui kementerian ter-



KR-JOKO SANTOSO

kait, yakni Kemendikdasmen beserta jajarannya, seperti Perpustakaan dan Badan Bahasa.

Sampai penghujung 2024 peringkat literasi (kemampuan baca tulis masyarakat) kita amat sangat rendah. Memang ada kemajuan di bidang Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dari sebelumnya 71,4 menjadi 73,52 di tahun 2024. Tetapi bila dibandingkan dengan negara-negara lain, peringkat literasi Indonesia terbilang memprihatinkan.

Menurut UNESCO, peringkat literasi RI hanya di urutan kedua dari bawah. Dalam catatan UNESCO, minat baca masyarakat kita hanya di angka 0,001 persen. Di antara 1.000 penduduk hanya ada satu (1) orang

yang memiliki minat baca memadai. World Population Review juga mencatat, peringkat melek huruf RI ada di posisi ke-86 dari 184 negara. Sementara dalam hal kegemaran membaca, majalah CEOWORLD melaporkan, Indonesia berada di posisi ke-31.

Selanjutnya menurut situs informasi World Atlas, tingkat melek huruf Indonesia menempati peringkat 105 dari 193 negara. Dan menurut lembaga PBB di bidang pendataan, UIS (2021), peringkat literasi Indonesia ada di peringkat 100 dari 208 negara. Di tingkat ASEAN sendiri, pada 2024 kegemaran membaca masyarakat Indonesia ada di peringkat ke-5. Peringkat pertama Brunei Darussalam, kedua Singapura, ketiga Vietnam, dan keempat Filipina.

Jadi, data sudah banyak berbicara. Dengan kondisi seperti itu, mimpi untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045 hanya sebuah utopia. Agar cita-cita Indonesia Emas tercapai, tingkat literasi Indonesia harus sejajar Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan juga Cina. Aksi nyata Presiden Prabowo dengan jajarannya sangat dinanti.

Yang dibutuhkan saat ini bukan hanya 'omong-omong' di ruang-ruang seminar dan semacamnya, tetapi aksi nyata yang nyata-nyatanya. Ada banyak aksi nyata yang bisa dilakukan pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan untuk menaikkan standar dan peringkat literasi masyarakat. (*)-d

*)Sarworo Soeprapto, peminat masalah sosial dan kebudayaan, tinggal di Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)

No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugianto, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan : H Ishaq Zuboedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Koin Jagat: Antara Tren Digital dan Tantangan Keberlanjutan

AKHIR-AKHIR ini aplikasi Koin Jagat yang diperkenalkan di Indonesia pada November 2022 telah menarik perhatian publik. Sebagaimana dilansir dari Warta Ekonomi, Koin Jagat merupakan aplikasi yang berfokus pada lokasi dan dikembangkan oleh Jagat Technology Pte. Ltd. adalah sebuah perusahaan yang beroperasi di Singapura dan Indonesia.

Aplikasi ini memperkenalkan ide untuk mencari koin digital yang bisa ditukar dengan uang tunai. Keberhasilan yang cepat terjadi karena adanya sistem yang tidak mustahil bagi pengguna yang dominan adalah Generasi Z untuk mendapatkan keuntungan hanya dengan bermain. Namun, di balik fenomena ini, terdapat sejumlah kontroversi yang perlu dikaji lebih dalam.

Karena bagaimanapun, keunikan Koin Jagat terletak pada konsepnya yang menggabungkan permainan dengan keuntungan secara finansial. Pengguna bisa mencari koin di dunia virtual, layaknya berburu harta karun, lalu menukarkannya dengan uang nyata, dari uang sebesar Rp. 300.000 hingga 1.000.000. Hal ini menjadi daya tarik utama bagi banyak orang, terutama generasi muda yang aktif di dunia digital. Selain itu, integrasi teknologi augmented reality (AR) memberikan pengalaman interaktif yang lebih menarik, mirip dengan fenomena PokEmon Go beberapa tahun lalu.

Tidak hanya itu, sistem Koin Jagat juga mendorong interaksi sosial karena pemain dapat berburu bersama di lokasi-lokasi tertentu seperti yang diberlakukan di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Banyak komunitas terbentuk karena ketertarikan terhadap aplikasi ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa Koin Jagat tidak sekadar aplikasi hiburan, tetapi juga membangun ekosistem digital yang luas.

Namun demikian, di balik popularitasnya, Koin Jagat menghadapi berbagai kritik. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah dampaknya terhadap ketertiban umum. Banyak pengguna berkumpul di tempat tertentu demi mendapatkan koin, sehingga berpotensi

Fathor Razi

si menimbulkan kerumunan yang mengganggu aktivitas masyarakat. Bahkan, ada laporan yang menyebutkan bahwa beberapa pengguna tidak mematuhi aturan lalu lintas saat berburu koin, meningkatkan risiko kecelakaan, hingga merusak lingkungan.

Selain itu, model bisnis Koin Jagat juga dipertanyakan. Apakah aplikasi ini berbasis skema insentif betul-betul transparan? Ini dikarenakan untuk menekan kemungkinan terjadi eksploitasi data pengguna. Beberapa pengamat ekonomi digital bahkan membandingkannya dengan skema ponzi atau model bisnis berbasis perekrutan anggota baru untuk memperoleh keuntungan. Karena itu, perlu ada kajian lebih lanjut mengenai mekanisme putaran dana di dalam aplikasi ini.

Aspek keamanan data juga menjadi perhatian utama. Aplikasi yang mengandalkan lokasi pengguna harus memiliki sistem perlindungan data yang kuat. Jika tidak dikelola dengan baik, ada potensi kebocoran data pengguna yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Apalagi, data lokasi merupakan informasi yang sangat sensitif dan bisa digunakan untuk tujuan yang tidak semestinya.

Peran Pemerintah

Melihat dampak yang ditimbulkan, pemerintah mulai mengambil langkah-langkah untuk mengawasi operasional Koin Jagat. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengimbau pengembang aplikasi untuk memperhatikan norma hukum dan tidak mengabaikan aspek ketertiban masyarakat. Hal ini menjadi langkah yang penting agar aplikasi-aplikasi berbasis ekonomi digital tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial.

Selain itu, adanya PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menjadi dasar hukum pemerintah terhadap aplikasi Jagat Koin ini. Karena itu, Model bisnis berbasis gamifikasi seperti ini perlu diawasi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Jika Koin Jagat tidak mampu menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku, bukan tidak mungkin aplikasi ini akan mengalami nasib yang sama seperti beberapa aplikasi sejenis yang sebelumnya dilarang di Indonesia.

Last but not least, fenomena Koin Jagat menunjukkan bagaimana teknologi digital terus berkembang dan mengubah cara orang berinteraksi dengan dunia virtual. Konsep permainan yang dikombinasikan dengan insentif finansial memang menarik, tetapi juga membawa sejumlah risiko yang harus diantisipasi. Masyarakat khususnya Gen Z diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan aplikasi ini, sementara pemerintah dan pengembang aplikasi harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan berkelanjutan. (*)-d

*)Fathor Razi, Alumnus Program Studi Hukum Bisnis Syariah pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Saat ini bekerja di Law Office F1 & Partners.

Pojok KR

Polda Jateng ungkap kasus TPPO di Gunung Kemukus.

- Kok baru diungkap sekarang.

Ekonomi DIY tahun 2024 tumbuh hingga 5,03 persen.

- Berharap daya beli masyarakat meningkat.

Pemerintah daerah pangkas anggaran dinas.
- Layanan masyarakat jangan dipangkas.

Berabe